

*Jon Martins Ximenes; Serviço Nacional
Inteligência....*

Serviço Nacional Inteligência; Hambatan, Tantangan, dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional di Timor Leste

Jon Martins Ximenes

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email : jojolereलोho@gmail.com

Abstract

This research is a strategy to improve the performance of National Serviço Intelligence (SNI) in carrying out national security in Timor Leste. The influence of globalization that is increasingly felt throughout the world today has prompted some people to question the existence of the National Intelligence Service (SNI) in facing internal and external threats with professionals. The research method used in this research is descriptive qualitative data collection, namely interviews, observations, group discussions and documentation. The conclusion of this research is that Serviço Nacional Inteligência (SNI) plays a role in producing information that contributes to maintaining national independence, national interests and external security, as well as ensuring internal security in preventing sabotage, terrorism, espionage and organized crime. However, the low quality of human resources, lack of budget, and limited facilities and infrastructure are obstacles and challenges for the Serviço Nacional Inteligência (SNI) in maximizing it as a government information agency.

Keywords: *Serviço Nacional Inteligência, strategy, national security, Timor Leste*

Abstrak

Pengaruh globalisasi yang semakin terasa diseluruh dunia mendorong sebagian orang mempertanyakan eksistensi *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) dalam menghadapi berbagai ancaman baik eksternal maupun internal yang menurut sifatnya berpotensi merubah atau menghancurkan supremasi hukum yang telah ditetapkan secara konstitusional di Timor Leste. Olehnya itu, penelitian bertujuan untuk memahami eksistensi *Serviço Nacional Inteligência* (SNI); Hambatan, Tantangan dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional di Timor Leste. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, diskusi grup dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) memiliki peran vital dalam mengolah dan menghasilkan informasi yang berdaya guna dalam menjaga kemerdekaan nasional, kepentingan nasional dan keamanan eksternal Timur Leste, serta memastikan keamanan internal dari berbagai upaya sabotase, terorisme, spionase, dan kejahatan terorganisir lainnya. Namun, rendahnya mutu SDM, minimnya anggaran, serta sarana dan prasarana yang terbatas menjadi hambatan dan tantangan bagi *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) dalam memaksimalkan perannya sebagai badan informasi pemerintah.

Kata Kunci: *Serviço Nacional Inteligência, strategi, keamanan nasional, Timor Leste*

A. Latar Belakang Masalah

Pasca memisahkan diri dari Indonesia melalui suatu referendum di tahun 1999¹. Timor-Leste dulunya bernama Timor Timur telah resmi menjadi negara berdaulat di tahun 2002. Sebagai negara berdaulat, pemerintah bersama rakyatnya memiliki hak dan kewajiban dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negaranya, baik kedaulatan teritorial maupun kedaulatan politik. Pasal 6 Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) 2002 menegaskan bahwa tujuan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) selain untuk mempertahankan dan menjamin kedaulatan negara juga bertujuan melindungi kepribadian dan warisan budaya timur orang Timor-Leste. Olehnya itu, objek keamanan nasionalnya meliputi perlindungan keutuhan teritorial, keamanan nasional, dan kedaulatan politik.²,

Pertahanan dan keamanan nasional, keduanya diatur dalam sistem keamanan nasional terintegrasi yang didesain guna menghadapi berbagai macam ancaman baik eksternal maupun internal. Untuk bidang pertahanan, tanggung jawab dibebankan pada *Falintil-Força Defeza de Timor Leste (F-FDTL)*. Organ ini memiliki kewajiban untuk menjaga kemerdekaan nasional, keutuhan wilayah, serta kebebasan dan keamanan penduduk terhadap adanya agresi dari luar ataupun ancaman eksternal yang menyangkut tatanan konstitusional.³ Di bidang keamanan, wewenang ini berada pada *Policia Nacional de Timor Leste (PNTL)* yang diserahi tanggung jawab dalam menegakkan demokrasi dan menjamin keamanan rakyat di dalam negeri (keamanan internal)⁴.

Selain kedua organ diatas terdapat pula *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* yang memiliki peran vital sebagai organ informasi sipil dibawah kekuasaan Perdana Menteri. Organ ini merupakan salah satu bagian dari institusi keamanan nasional yang bertanggungjawab dalam menghasilkan informasi yang berkontribusi dalam menjaga kemerdekaan nasional, kepentingan nasional dan keamanan eksternal. Disamping itu, juga menghasilkan informasi dalam menjamin keamanan internal dari tindakan sabotase, terorisme, spionase, kejahatan terorganisir maupun tindakan yang menurut sifatnya dapat mengubah atau menghancurkan sendi-sendi bernegara yang telah ditetapkan secara konstitusional. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* Nomor 9/2008 tentang Sistem Intelijen

¹ Referendum dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999 dimana rakyat Timur Timor diberikan dua opsi dalam mekanisme voting yakni (i) otonomi khusus untuk Timur Timor dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau (ii) menolak otonomi khusus, yang menyebabkan Timur Timor memisahkan diri dari Indonesia. 78,50 % rakyat Timur Timor memilih opsi kedua dan memisahkan diri dari Indonesia, sedangkan hanya 21,50% rakyatnya yang memilih opsi pertama, menerima otonomi khusus dan Timur-Timor tetap menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

² Dina Sunyowati, Haidar Adam, and Ria Tri Vinata, 'The Principles of Uti Possidetis Juris As an Alternative to Settlement Determination of Territorial Limits in the Oecusse Sacred Area (Study of the NKRI and RDTL Boundaries)', *Yuridika*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v34i2.12640>>.

³ Pasal 146 Konstitusi RDTL 2002

⁴ Pasal 147 Konstitusi RDTL 2002

Republik Democrtatik Timor Leste. Masih dalam ketentuan yang sama, Pasal 3 mengatur *Falintil-Força Defeza de Timor Leste (F-FDTL)*⁵ dan *Policia Nasional de Timor Leste (PNTL)* tetap diberi wewenang dan kompetensi untuk mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan misi spesifik kerja dalam menjaga keamanan nasional.⁶ Dari ketentuan ini, terdapat batasan wewenang dari masing-masing organ sesuai dengan misi spesifik kerja, termasuk pula memberikan batasan kepada badan informasi sipil dalam melakukan antisipasi di lapangan.

Serviço Nacional Inteligência (SNI) sebagai salah satu dari institusi keamanan negara yang bertugas menghasilkan informasi dalam menjaga kemerdekaan nasional, kepentingan nasional dan keamanan eksternal dan internal dalam kipranya sejauh ini tidak lepas dari berbagai sorotan masyarakat yang menilainya tidak mampu bekerja secara profesional dan kompeten dalam melaksanakan wewenangnya. Sorotan tersebut tidak terlepas dari berbagai konflik yang kerap terjadi di Timur Leste yang bertujuan melumpuhkan pemerintahan yang sah, seperti kasus hilangnya senjata dalam krisis politik tahun 2006, kasus penyerangan terhadap Presiden Jose Ramos Horta dan Perdana Menteri Xanana Gusmao pada 11 februari 2008. Selain itu, kasus kaburnya beberapa tahanan yang melarikan diri dari penjara hingga saat ini belum selesai menjadi opini publik yang tidak mendapat jawaban dan kepastian, telah menambah daftar keraguan publik atas ketidakmampuan *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* dalam mengumpulkan dan menghasilkan informasi terhadap isu-isu potensial yang bervariasi⁷. Dampaknya, tentu akan berimplikasi pada *decision maker* kepemimpinan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Serviço Nacional Inteligência (SNI); Hambatan, Tantangan dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional di Timor Leste*”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-semuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, diskusi group dan pemanfaatan dokumen.⁸ Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang eksistensi *Serviço Nacional Inteligência (SNI) Republica Democratica Timor Leste (RDTL)*; Hambatan, Tantangan dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Timor Leste.

⁵ Merupakan angkatan bersenjata, jika di Indonesia disebut dengan istilah TNI

⁶ Ikrar Nusa Bhakti and Diandra Megaputri Mengko, 'Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru', *Jurnal Penelitian Politik*, 2016.

⁷ Ruy Martins Altenfelder Silva, 'Prêmio Moinho Santista: Tradição a Serviço Da Inteligência Nacional', *Estudos Avançados*, 1994 <<https://doi.org/10.1590/s0103-40141994000300096>>.

⁸ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2013.

C. Pembahasan.

1. Sejarah Pembentukan Serviço Nacional Inteligência (SNI)

Serviço Nacional da Inteligência (SNI) merupakan produk peninggalan pemerintahan konstitusional pertama dibawah kekuasaan Perdana Menteri (PM) Dr. Mari Aminuddin Bin Alkatiri. Undang-Undang (UU) tersebut di kelola oleh kebijakan pertama yang pada saat itu mengingginkan perubahan *National Security Adviser (NSA)* yang di tinggalkan pada era *United Nation Administration Of East Timor (UNTAET)* pada tahun 2002 dan ditransformasi menjadi Organisasi Inteligen Negara di bawah pengendalian *Serviço Nacional de Sigurança do Estado (SNSE)* pada tahun 2003. Konsep Undang-Undang *Serviço Nacional de Sigurança do Estado (SNSE)* berdasarkan panduan dari Undang-Undang *Australia Security and Intelligent Organisation (ASIO)* dan *(SIS) Serviço Informação Secreta- Portugal*. Dengan demikian proyek undang-undang ini berjalan pada masa era *United Nations Transition and Adminstration of East Timor (UNTAET)* dengan bantuan-bantuan terbatas dari *SIS (Serviço Informação Secreta – Portugal)*, *ASIS (Autralian Secret Intelligent Service)*, *RD, (Research Development)* badan Inteligen Malaysia, Badan Inteligen Negara (BIN) Indonesia, dan beberapa ahli hukum dan advisor inteligen. Tetapi, bantuan-bantuan tersebut sangat informal, terbatas dan tertutup.⁹ Dalam perkembangannya, Undang-Undang ini mengalami banyak perubahan dan kendala akibat terbatasnya sumber daya, tenaga ahli serta minimnya anggaran untuk memperlancar proyek ini, sehingga Undang-Undang ini tidak bisa di implementsikan di Timor Leste. Dilain sisi, dihambat pula oleh situasi dan letak geografis yang lebih kecil serta adanya ancaman-ancaman yang bervariasi.

Pada pertemuan Dewan Menteri Kabinet I tahun 2005, Undang-Undang *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* tidak dapat disahkan karena adanya perdebatan internal yang secara teknis dilatarbelakangi oleh banyaknya campur tangan dari beberapa negara. Penundaaan pengesahan ini berdampak pada keamanan nasional Timor Leste sampai pada kejadian krisis militer 2006.¹⁰

Ditahun 2006, Undang-Undang *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* menjadi perhatian Perdana Menteri (PM) DR. José Manuel Ramos Horta yang mempunyai wewenang sebagai Kepala Pemerintahan Konstitusional II. Pada waktu itu menegaskan bahwa organisasi *Serviço Nacional de Segurança do Estado (SNSE)* ditempatkan dibawah pengawasan langsung oleh *President Republica Democratica Timor Leste (RDTL)*, namun penegasan ini tidak dilanjuti sampai masa jabatannya berakhir. Akan tetapi, Undang-Undang ini telah diselesaikan selama masa jabatannya. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão, Undang-Undang *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* menjadi

⁹ Trina Supit, *Rebuilding the Education Sector in East Timor during UNTAET: International Collaboration and Timorese Agency, Rebuilding the Education Sector in East Timor during UNTAET: International Collaboration and Timorese Agency*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9780429326554>>.

¹⁰ Muradi Muradi, 'PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA', *CosmoGov*, 2017 <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11859>>.

prioritas dalam tujuan program kerja pemerintahannya yang memegang Pemerintahan Konstitusi IV. Undang-Undang *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* dipercepat dan mendapat pengesahan dari Dewan Kabinet Menteri pada hukum organik dari Dinas Intelijen Nasional yang terdahulu bernama *Serviço Nacional de Segurança do Estado (SNSE)* dirubah menjadi *Serviço Nacional Inteligência (SNI)*.

2. Dasar Hukum Legalitas Serviço Nacional da Inteligência (SNI)

Serviço Nacional Inteligência (SNI) Republica Democratica Timor-Leste (RDTL) adalah bagian dari keamanan nasional dan merupakan instrumen tindakan dan jaminan terhadap ancaman keamanan eksternal dan internal. Bahkan, konsolidasi aturan hukum demokrasi melibatkan pengamanan independensi dan kedaulatan nasional dan memastikan keamanan internal, sementara itu menghormati hak-hak, kebebasan dan menjamin kenyamanan warga negara, dan penciptaan rezim hukum yang mengatur pelayanan publik dari sistem intelijen.¹¹ *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* bertanggung jawab untuk menghasilkan informasi yang berkontribusi untuk menjaga independensi nasional, kepentingan nasional dan keamanan eksternal, serta memastikan keamanan internal dalam pencegahan sabotase, terorisme, spionase, kejahatan terorganisir, dan tindakan yang pada dasarnya dapat mengubah atau menghancurkan aturan hukum yang ditetapkan secara konstitusional. *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* adalah layanan yang dipersonalisasi dari Negara dengan kompetensi internal dan eksternal, dicegah dari melakukan tindakan yang mengakibatkan pelanggaran hak, kebebasan dan jaminan yang diabadikan dalam Konstitusi atau yang merupakan kompetensi eksklusif dari otoritas lain yang menjalankan fungsi keamanan internal, Kementerian Umum atau Pengadilan, dimana agen SNI dilarang untuk melanjutkan ke penangkapan orang dan untuk memulai proses pidana.

Dengan demikian, Parlemen Nasional memutuskan, di bawah ketentuan Hukum Parlemen Undang-Undang *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* Nomor 9/2008 tentang Sistem Intelijen Republik Democrtatik Timor Leste dan peraturan Undang-Undang (UU) Nomor 3/2009 tentang layanan *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* menjadi dasar hukum legalitas *Serviço Nacional Inteligência (SNI)*, yang mampu mempertahankan diri terhadap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan nasional atau menumbangkan aturan hukum yang ditetapkan secara konstitusional, eksklusif melayani Negara Timor Leste dan menjalankan fungsinya sesuai dengan wewenang dan tugas yang diamanahkan oleh negara.¹²

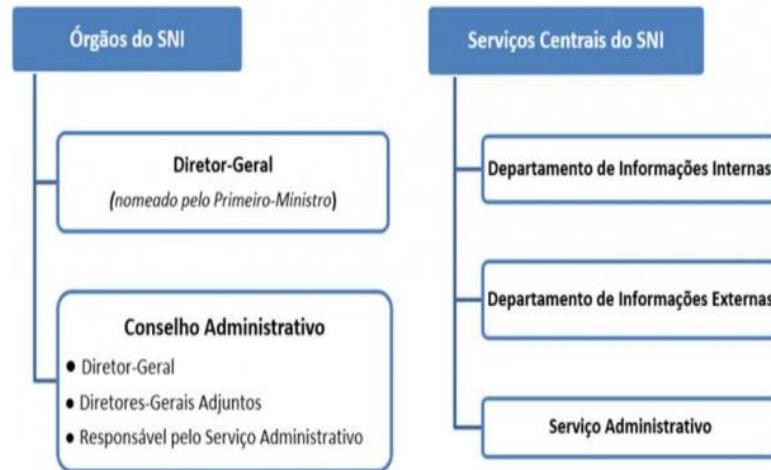
3. Struktur Organisasi Serviço Nacional Inteligência (SNI)

Serviço Nacional Inteligência (SNI) dipimpin oleh seorang Direktur Umum (Dirut) yang ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri (PM) yang disamakan untuk tujuan remunerasi dengan posisi Menteri. Penunjukan ini harus didahului dengan

¹¹ J. Melorose, R. Perroy, and S. Careas, 'Código de Ética Profissional Do Servidor Público Civil Do Poder Executivo Federal', *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 2015.

¹² 'Democratic Republic of Timor-Leste: 2019 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of Timor-Leste', *IMF Staff Country Reports*, 2019 <<https://doi.org/10.5089/9781498313599.002>>.

informasi dan konsultasi dengan President Republik (PR) dan dibantu oleh dua wakil Dirut Umum.¹³ Berikut ini adalah struktur organisasi dan pelayanan pusat *Serviço Nacional Inteligência (SNI)*:



Gambar 1. Struktur Organisasi SNI

Diretor Geral atau Director Umum (Dirut) bertanggung jawab atas : (i) Mengawasi kegiatan layanan dan pusat data dan melakukan inspeksi, pengawasan, dan koordinasi, (ii) mengetuai dewan administratif, (iii) menerapkan pedoman umum dan instruksi nyata dari Perdana Menteri (PM), serta musyawarah dengan dewan pengawas, (iv) memandu persiapan anggaran *Serviço Nacional Inteligência (SNI)*, (v) mempersiapkan dan menyerahkan kepada Perdana Menteri (PM) untuk persetujuan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya dan laporan kegiatan untuk tahun sebelumnya, (vi) mengetuai komisi teknis. Tugas direksi atau *conselho* atau dewan administratif dari direktur umum dan wakil direktur umum yang bertanggung jawab terhadap layanan administratif *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* adalah mempersiapkan rancangan anggaran tahunan dan menyerahkannya kepada Perdana Menteri (PM) untuk disetujui serta mengelola alokasi anggaran.

4. Peran *Serviço Nacional Inteligência (SNI)*

Berdasarkan Undang-Undang (UU) *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* Pasal 3 yang memberikan tugas dan wewenang kepada *Falintil-Força Defeza de Timor Leste (F-FDTL)* dan *Policia Nacional de Timor Leste (PNTL)* untuk mencari informasi yang dibutuhkan sesuai dengan misi spesifik kerja dalam menjaga keamanan nasional. Tentu saja sesuai dengan Pasal 3 memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada *FalintilForça Defeza de Timor Leste (F-FDTL)* dan *Policia Nacional de Timor Leste (PNTL)* dan juga memberikan keterbatasan kepada badan informasi sipil, dalam melakukan antisipasi di lapangan, hal ini dilakukan untuk mencegah keaslian atau originalan *Serviço*

¹³ Helio José Santos Maia and Maria Helena da Silva Carneiro, 'O Desafio Do Timor-Leste Atual: Em Busca de Uma Identidade Nacional Ligada à Língua Portuguesa', *Remate de Males*, 2018 <<https://doi.org/10.20396/remate.v38i1.8651113>>.

Nacional Inteligência (SNI) jika terjadi adanya penduplikatan wewenang kerja dan tanggung jawab kerja di lapangan.¹⁴

a) Kompetensi Serviço Inteligência Nacional (SNI)

Kasus hilangnya senjata dalam krisis politik Timur Leste tahun 2006, kasus kaburnya tahanan dari penjara dan belum menunjukkan titik terang penyelesaian, hingga kasus penyerangan terhadap kepala negara dan kepala pemerintahan pada 11 Februari 2008 menunjukkan bahwa Timur Leste sewaktu-waktu dapat memperoleh ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara. Oleh sebab itu penguatan kompetensi *Serviço Inteligência Nacional (SNI)* diperlukan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dalam menghimpun informasi guna melakukan deteksi dini terhadap berbagai tindakan yang mengancam keamanan internal dan eksternal.¹⁵ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Undang-Undang (UU) *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* Nomor 3/2009 tentang layanan *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* menegaskan *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* sebagai satu-satunya badan yang bertugas memproduksi informasi yang berkontribusi untuk menjaga kemerdekaan nasional, kepentingan nasional dan keamanan eksternal, serta memastikan keamanan internal dalam mencegah sabotase, terorisme, spionase, kejahatan terorganisir dan tindakan yang menurut sifatnya dapat mengubah atau menghancurkan aturan hukum yang ditetapkan secara konstitusional”¹⁶

Disamping itu, *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* memiliki kompetensi yang sangat penting guna melakukan penyelidikan, penggalangan, dan pencegahan terhadap ancaman global seperti terorisme, penyelundupan dan perdagangan manusia (*human trafficking*), narkoba dan obat-obatan terlarang serta adanya infiltrasi asing. Ancaman global ini nyata terjadi dan dapat menjerumuskan Timor Leste sebagai negara berdaulat yang gagal dalam memberikan perlindungan bagi rakyat dan warisan budaya orang Timor Leste.

Kasus human trafficking misalnya, Timor Leste sangat rentan terjadi. Pada tahun 2018, terdapat 64 korban *human trafficking*.¹⁷ Menurut Penelitian *International Organisation for Migration Timor Leste (IOM)*, organisasi internasional yang bergerak dalam pencegahan *human trafficking* mengungkapkan bahwa letak geografis, rendahnya pendapatan masyarakat, serta sempitnya lapangan kerja menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia di Timor Leste. Ada tiga jenis perdagangan orang yang lazim di Timor Leste. Pertama

¹⁴ Djair Picchiai and Alan Rocha, 'A Inteligência Analítica Em Pequenas Unidades Do Setor de Segurança Pública No Sul de Minas Gerais', *Ciência Da Informação Em Revista*, 2019 <<https://doi.org/10.28998/cirev.2019v6n2g>>.

¹⁵ Trisapto Agung Nugroho, 'Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.275-293>>.

¹⁶ Wahyu Kuncoro, 'Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya Dalam Pengawasan Intelijen Yang Akuntabel Di Badan Intelijen Negara', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5629>>.

¹⁷ Jaynitha Vijayan and Geetha A. Rubasundram, 'Human Trafficking: An Asian Perspective', *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 2020 <<https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200422>>.

Perdagangan Luar kedalam (70%), perdagangan dari negara lain (20%) dan perdagangan Internal (10%). Perdagangan yang dimaksud untuk tujuan kerja paksa dan eksploitasi seksual. Mayoritas korbannya adalah wanita yang didatangkan dari China, Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Filipina. Perdagangan domestik kerap juga terjadi terhadap anak dibawah umur 18 tahun. Tujuannya untuk keperluan domestik seperti perbudakan, tenaga kerja dan eksploitasi seksual.

Dari data yang dikemukakan oleh IOM (*International Organisation for Migration*) Timor Leste dalam program Timor Leste *Counter Traffick* dapat disimpulkan bahwa akan memberikan input informasi bagi *Serviço Nacional Inteligência (SNI)*, *Policia Nasional Timor Leste (PNTL)* untuk melakukan *early detection* dan *early warning* termasuk pula instansi terkait khususnya Imigrasi dan Bea Cukai untuk lebih meningkatkan profesionalis tugas dan tanggung jawab dilapangan. Hal ini disebabkan karena pintu masuk yang dilewati para wisatawan selalu membuka celah bagi kegiatan *human trafficking* maupun kegiatan yang lain seperti peredaran narkotika dan obat-obat terlarang.¹⁸ Dalam konteks Timor Leste, sistem pencegahan dan pengamanan perbatasan sangat terbuka. Sebuah peluang bagi berkembangnya peredaran narkoba sebagai kejahatan terorganisir lintas batas negara. Biasanya, kejahatan ini memanfaatkan jalur ilegal diperbatasan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba di Timor Leste. Kadang pula jaringan narkoba internasional menjadikan Timor Leste sebagai negara transit, baik melalui bandara, pulau, dan atau pelabuhan. Contoh kasus yang terungkap terjadi pada 18 Oktober 2012.

Policia Nasional Timor Leste (PNTL) melakukan penangkapan terhadap warga Negara Indonesia yang coba menyelundupkan satu tas yang berisi sabu-sabu. Kemudian, keesokan harinya, 19 Oktober 2012 dilakukan penangkapan terhadap warga negara Afrika Selatan di salah satu hotel di Dili. Kedua tersangka merupakan satu jaringan yang sama namun berasal dari negara yang berbeda. Dari kasus tersebut dapat diasumsikan bahwa narkoba telah merajalela diseluruh dunia dan akan menjadi ancaman bagi semua negara.¹⁹ Timor Leste pun demikian, dijadikan sebagai daerah transit, tidak lepas dari anggapan atas lemahnya penegakan hukum serta minimnya sumber daya dan alat deteksi narkoba yang mudah dilewati.²⁰ Olehnya itu, kehadiran dan peran pemerintah khususnya *Serviço Nacional Inteligência (SNI)*, *Policia Nasional Timor Leste (PNTL)*, Imigrasi dan Bea Cukai sangat diharapkan oleh masyarakat untuk dapat melakukan tugasnya secara maksimal dan professional. Berdasarkan hal tersebut, *Serviço Nacional Inteligência (SNI)* harus memainkan perannya dalam melakukan penyelidikan dan

¹⁸ Ursula De Almeida, 'Reintegration of FALINTIL, Timor-Lestes Ex-Combatants, Then and Now', *Journal of Peacebuilding and Development*, 2017 <<https://doi.org/10.1080/15423166.2017.1286251>>.

¹⁹ Renaldo Benarrivo and Nala Nourma Nastiti, 'Diplomacy And Defense Spatial Planning', *Jurnal Dinamika Global*, 2020 <<https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.236>>.

²⁰ Sahudiyono Sahudiyono and Fraquelino Pinto, 'Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota'ain Perbatasan Negara Indonesia - Timor Leste', *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 2019 <<https://doi.org/10.33489/mibj.v17i2.206>>.

penggalangan informasi terhadap jaringan dan peredaran narkoba sebagai bagian dari upaya untuk pencegahan terhadap keamanan negara.

Lalu, bagaimana perkembangan infiltrasi asing di Timor Leste. Infiltrasi dimaknai sebagai suatu kegiatan penyusupan perorangan atau kelompok untuk menghancurkan kekuatan lawan dengan cara tidak sadar. Dalam konteks era digital saat ini, teknologi komunikasi memiliki peran vital yang digunakan oleh banyak orang guna memudahkan pertukaran informasi tanpa harus dibatasi oleh batas wilayah negara. Media sosial misalnya, penggunaannya didominasi oleh generasi muda, ramai digunakan sebagai alat pertukaran informasi bahkan infiltrasi budaya asing.²¹ Melalui media sosial, generasi muda memiliki peluang besar untuk memilah dan memilih budaya untuk ditiru.

Di Timur Leste, infiltrasi asing berjalan dengan perlahan tetapi pasti merasuki kehidupan masyarakat. Di era globalisasi, infiltrasi budaya asing telah melemahkan negara Timor Leste melalui pengaruh pola hidup dan pola pikir yang menjerumuskan generasinya pada pergaulan bebas dan kehidupan yang hedonisme (pesta miras). Disamping itu, pengaruh infiltrasi asing melalui pola hidup dan pola pikir dilakukan dengan metode pengadopsian bahasa formal yang dipergunakan masyarakat lokal Timor Leste menjadi bahasa Formal Tetum dan bahasa Portugis. Bahasa Portugis mulai diajarkan diseluruh kurikulum pendidikan dan dapat dipergunakan dalam kegiatan administrasi negara. Padahal konstitusi RDTL 2002 menegaskan untuk melindungi kepribadian dan warisan budaya timur orang Timor-Leste. Untuk meminimalisasi pengaruh buruk infiltrasi asing, harus ada penguatan budaya lokal agar kemampuan budaya lokal dalam menahan dan mementahkan nilai asing makin kuat. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mengenalkan bahasa lokal kepada generasi muda melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non formal.²² Dalam konteks ini, *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) berperan untuk melakukan penyelidikan dan penggalangan informasi terhadap infiltrasi asing sebagai upaya pencegahan terhadap keamanan negara.

Dari uraian diatas, Fundasaun Mahein (FM) menganggap *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) sebagai tempat akumulasi data dan informasi tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan kompetensi wewenang yang diberikan. Kelemahan ini muncul dikarenakan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang untuk menganalisa data dan informasi yang diterima sebagai produk intelijen yang memberikan kontribusi kepada *decision maker* dalam pengambilan keputusan.²³ Meskipun demikian, *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) selalu menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan Undang-Undang (UU) dan sebagai salah satu institusi yang terintegrasi pada semua institusi pemerintahan khususnya

²¹ Amalia Zidatul Ulum and Suharno Suharno, 'Infiltrasi Budaya Global Terhadap Budaya Lokal Pesta Baratan Dalam Mempengaruhi Pembentukan Budaya Kewargaan', *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2019 <<https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.10023>>.

²² Abdul Malik, Tamjidillah Tamjidillah, and Satriawan Satriawan, 'Budaya Literasi Dan Infiltrasi Gerakan Islam Radikal Di Pesantren Indonesia', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2020 <<https://doi.org/10.15642/islamica.2020.15.1.48-67>>.

²³ Surwandono, Ratih Herningtyas, Dian Nursita, 'Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara', *Jurnal Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33822/jm.v1i1.289>>.

di institusi keamanan nasional untuk mencegah dan mengatasi kasu-kasu ilegal seperti kasus Teroris, *Crime Organisation*, Narkoba, *Human Traffic* dan lain-lain.

D. **Faktor Penghambat Serviço Nacional Inteligência (SNI) Dalam Menjalankan Tugas**

Intelijen pada dasarnya memiliki tiga fungsi yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ketiga fungsi tersebut berjalan secara simultan. Berdasarkan konsep tersebut, badan intelijen suatu negara harus menjalankan ketiga fungsi tersebut. Untuk kasus *Serviço Nacional Inteligência* (SNI), SNI telah melaksanakan ketiga fungsi tersebut mulai dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Namun dalam pelaksanaan fungsi intelijen tersebut *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) masih belum mampu optimal, karena terkendala level kapasitas agen *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) yang masih rendah.²⁴ Sebuah tantangan yang tidak lepas dari tubuh agen *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) itu sendiri.²⁵ Rendahnya kapasitas agen *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) tidak terlepas dari pendidikan dan pelatihan –pelatihan yang tidak berkelanjutan. Hal ini tentu dipengaruhi pula oleh dukungan dana operasional yang kurang, bukan terbatas. Dampaknya, dapat menghasilkan informasi yang tidak dianggap akurat oleh agen intelijen *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) sendiri.

a) **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu katalisator atau alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga.²⁶ Berdasarkan diskusi dengan beberapa narasumber bahwa jumlah agen intelijen yang dimiliki oleh *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) sangat terbatas dan belum memenuhi standard baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Pada aspek kualitas dipengaruhi oleh minimnya pendidikan dan pelatihan yang tidak berkelanjutan sehingga berimplikasi pada kemampuan agen dalam melakukan tugasnya, dan tentu berdampak pada kinerja institusi dalam mengelola strategi perencanaan, pelaksanaan tugas dan pengoperasian dilapangan. Disamping itu, tidak semua SDM dari *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) merupakan agen tetap²⁷, tetapi ada yang bersifat agen kontrak yang masa kontraknya dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Olehnya itu, berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan pula bahwa rendahnya SDM dipengaruhi oleh (i) pola rekrutment dan assesment (penilaian) yang tidak maksimal terhadap motivasi, etos kerja, dan pola pikir calon personel (ii) pelatihan-pelatihan yang tidak berkelanjutan, (iii)

²⁴ Nugroho.

²⁵ Ivon Jorge da Silva, 'Inteligência Policial e Redes Sociais: A Polícia Federal Em Busca de Uma Política Constitucionalmente Sustentável', *Revista Brasileira de Ciências Policiais*, 2014.

²⁶ Robert L. Mathis and John H. Jackson, 'Manajemen Sumber Daya Manusia', in *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2012.

²⁷ Pegawai administrasi publik merupakan agen permanent dalam anggota *Serviço Nacional Inteligência* (SNI).

penempatan personil agen *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) dalam bidang tugas diluar spesialisasi dan kemampuannya, (iii) pola pikir agen *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) kadang masih mengikat pada salah satu organisasi dan partai (iv) pembinaan moril anggota *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) yang kurang optimal, serta (v) masih adanya ego-sektoral.

b) Sarana Prasarana

Selain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana juga sangat menentukan kinerja dari *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebab sarana dan prasarana merupakan salah satu alat penggerak atau penunjang bagi staf maupun agen dalam melaksanakan tugasnya.²⁸ *Serviço Nacional Inteligência* (SNI), sebagai institusi indenpedent yang berperan sebagai mata dan telinga pemerintah dari adanya berbagai ancaman keamanan eksternal dan internal, pada kenyataannya tidak didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Secara kasat mata, perkantoran dan tempat kerja masih sangat memprihatinkan. Begitupun dengan sarana dan prasarana lainnya seperti alat transportasi juga sangat terbatas, hal ini memicu efektivitas kerja. Padahal dari sisi lain alat transportasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam menunjang keberhasilan dari strategi kerja *Serviço Nacional Inteligência* (SNI).²⁹

E. Strategi Untuk Meningkatkan Kinerja Serviço Nacional Inteligência (SNI)

Konsolidasi aturan hukum yang demokratis dan penegakan Timor-Leste sebagai negara merdeka yang mampu menghadapi ancaman baru yang muncul dari praktik aksi terorisme, sabotase, spionase, kejahatan transnasional terorganisir, menuntut dibentuknya Badan Intelijen Nasional (SNI).³⁰ *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) adalah layanan yang dipersonalisasi dari Negara dengan kompetensi internal dan eksternal, dicegah dari melakukan tindakan yang melibatkan pelanggaran hak, kebebasan dan jaminan yang diabadikan dalam konstitusi atau yang merupakan kompetensi eksklusif dari otoritas lain yang menjalankan fungsi keamanan internal, Kementerian Umum atau Pengadilan, dilarang agennya untuk melanjutkan ke penangkapan orang dan untuk memulai proses pidana.³¹

Kompetensi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan keamanan nasional ditegaskan kembali dan pengawasan langsung Perdana Menteri (PM) atas *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) ditetapkan, dengan ketentuan bahwa badan ini secara eksklusif melayani Negara, dan dilarang keras untuk melanjutkan segala kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan politik / partai. Ditetapkan bahwa

²⁸ Ike Malaya Sinta, 'MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA', *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 2019 <<https://doi.org/10.15575/isema.v4i1.5645>>.

²⁹ Fitri Nuraini, Sinta Nuri Handayani, and Indra Permana, 'Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Semangat', *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Indonesias*, 2018.

³⁰ Tri Septin, 'Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam', *Keunggulan Bersaing Perusahaan*, 2019.

³¹ B. Arief Sidharta, 'Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum', *Veritas et Justitia*, 2015 <<https://doi.org/10.25123/vej.1423>>.

Komite Antar-Administrasi untuk Keamanan Dalam Negeri (dibuat dalam lingkup Undang-Undang (UU) Keamanan Dalam Negeri) juga berfungsi sebagai badan konsultatif dalam hal informasi dan badan koordinasi operasional baru yang disebut Komisi Teknis, yang akan memungkinkan efisiensi yang lebih besar dan artikulasi dalam pertukaran informasi antara Serviço Nacional Inteligência (SNI) dan layanan keamanan dan pertahanan.³²

1. Koordinasi dengan Falintil-Força Defeza Nasional Timor Leste (F-FDTL) dan Policia Nacional Timor Leste (PNTL)

Serviço Nacional Inteligência (SNI) Timor Leste dalam kordinasi kerja terdiri dari beberapa komponen kerja yaitu komponen 1) *Serviço Nacional Inteligência SNI*, 2) *Serviço Informação Militar SIM*, 3) *Serviço Informação Polisi SIP*, Bea Cukai, dan Imigrasi. Sistem kordinasi Serviço Nacional Inteligência (SNI) sesuai dengan UndangUndang (UU) secara teknis dan kordinasi operasi di lapangan disesuaikan dengan materi informasi yang didapat antara Serviço Nacional Inteligência (SNI) dengan badan keamanan nasional. Dalam pengambilan keputusan akan diambil keputusan pada rapat reguler bersama.³³ Koordinasi ini tidak lepas dari Undang-Undang (UU) nomor 9/2008 tentang Serviço Nacional Inteligência (SNI) Pasal 3 tentang Informasi Militer dan Polisi, dimana ketentuan ini berlaku untuk kegiatan pengumpulan inteligen yang dilakukan oleh Falintil-Força Defeza Nasional Timor Leste (F-FDTL) dan Policia Nacional Timor Leste (PNTL) untuk melakukan misi spesifik institusi dan memastikan keamanan militer dan memerangi kejahatan umum yang bersifat Universal.³⁴

2. Kerja Sama dengan Badan Intelijen Asing

Munculnya ancaman-ancaman baru seperti terorisme dan kejahatan transnasional lainnya dapat mempengaruhi suatu negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan munculnya ancaman-ancaman tersebut dapat merugikan negara, kerugiannya bisa dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan keamanan. Hal ini yang membuat suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain guna melindungi dan mencapai kepentingan nasionalnya.³⁵ Dilihat dari sejarah berdirinya *Serviço Nacional Inteligência* (SNI), kerja sama dengan badan intelijen asing sudah diterapkan mulai dari *advice-advice*, dan pemberian bantuan-bantuan terbatas yang diberikan dalam proses pembentukan Undang-

³² Ahmad Yani, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>>.

³³ Sugito, Tulus Warsito, and Achmad Nurmandi, 'A Toxicidade Institucional Em Reformas Do Setor De Segurança: Lições Aprendidas Sobre O Fracasso Na Construção Das Instituições De Segurança Do Timor-Leste', *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, 2020.

³⁴ Douglas Kammen, *Independent Timor-Leste: Between Coercion and Consent*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781108558488>>.

³⁵ Hana Hanifah, *Kerjasama Intelijen Indonesia Dengan Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Indonesia Periode 2015-2017*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Undang (UU) *Serviço Nacional Inteligência* (SNI). Bantuan-bantuan terbatas berasal dari negara Portugal SIS (*Serviço Informação Secreta – Portugal*), ASIS (*Australian Secret Intelligent Service*), (*Research Development*) badan Inteligen Malaysia, Badan Inteligen Negara (BIN) Indonesia.

Dalam kegiatan operasional, *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) bekerja sama dengan beberapa negara tetangga, seperti Badan Intelligen Negara (BIN) Indonesia dan ASIS (*Australian Secret Intelligent Service*). Kerja sama ini berupa kerja sama dibidang keamanan nasional setiap negara. Kerja sama yang dimaksud dalam bentuk pembagian informasi, penelitian, pelatihan-pelatihan, penanganan teroris, narkoba, *human trafficking*, *illegal crossing*, *illegal fishing*, dll.³⁶ Kerja sama tersebut sangat penting dan ini akan memberi ruang pada setiap agen intelijen khususnya Timor Leste, Indonesia dan Austrlia dalam proses pemberantasan teroris, human trafficking, narkoba dan *illegal crossing*, *ilegal fishing* dalam hal pemberian informasi kepada setiap negara untuk melakukan tindakan preventive.

3. Penguatan Sumber Manusia dan Teknologi

Dalam menjalankan fungsinya *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) menghadapi banyak tantangan dan hambatan diantaranya sumber daya manusia, teknologi, sarana dan prasana, keuangan operasional. Namun dari semua keterbatasan yang ada tidak menghalangi *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu bagian dari keamanan nasional yang memberikan informasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman baik berupa ancaman internal maupun eksternal.³⁷

Dalam rangka menghadapi ancaman dan tantangan yang dihadapi, *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) perlu melakukan upaya peningkatan dan mengoptimalkan profesionalisme *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) melalui upaya (i) adanya pola rekrutment dan assessment, (ii) pembenahan agen, (iii) pembekalan keterampilan melalui latihan-latihan, (iv) peningkatan kerja sama dengan negara tetangga dari berbagai aspek, (v) peningkatan sarana dan prasarana, (vi) menguasai penggunaan material di lapangan, (vii) personil yang ditempatkan harus sesuai dengan keahlian dan kemampuan, serta akses yang kuat terhadap sasaran yang ditujuh, (viii) pembinaan moril dan penanaman rasa nasionalis dan patriotik terhadap diri setiap anggota (ix) meningkatkan kesejahteraan.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan tentang *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) dapat disimpulkan bahwa *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) berperan

³⁶ Irhas Novianti Yasma'un, Audi Fatchur Rachman, and Nur Retno Ika Martiyah, 'Perjanjian Perbatasan Laut Antara Australia Dengan Timor Leste Terhadap Status Wilayah Laut Timor', *Perspektif*, 2018 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.679>>.

³⁷ Nabila Zubaidi, Dwi Cahyono, and Astrid Maharani, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan', *International Journal of Social Science and Business*, 2019 <<https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i2.17579>>.

dalam menghasilkan informasi yang berkontribusi untuk menjaga kemerdekaan nasional, kepentingan nasional dan keamanan eksternal, serta memastikan keamanan internal dalam mencegah tindakan sabotase, terorisme, spionase, dan kejahatan terorganisir. Selain itu, *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) merupakan salah satu institusi dari keamanan nasional yang berperan melakukan penyelidikan, pengalangan, dan pencegahan terhadap ancaman global, terorisme, penyelundupan dan perdagangan manusia, narkoba, dan infiltrasi asing. Selama ini, *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) dalam menjalankan tugas dan perannya masih kurang optimal disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang disebabkan oleh minimnya dukungaanggaran yang berimplikasi pada sarana dan prasarana, serta masih adanya ego-sektoral dalam diri anggota. Untuk meningkatkan kinerja dari *Serviço Nacional Inteligência* (SNI) terdapat strategi yang dilakukan diantaranya (i) penguatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Teknologi, (ii) koordinasi dengan *Falintil-Força Defeza Nasional Timor Leste (F-FDTL)* dan *Policia Nacional Timor Leste (PNTL)*, dan (iii) kerja sama dengan Badan Intelijen Asing.

DAFTAR PUSTAKA

- De Almeida, Ursula, 'Reintegration of FALINTIL, Timor-Lestes Ex-Combatants, Then and Now', *Journal of Peacebuilding and Development*, 2017 <<https://doi.org/10.1080/15423166.2017.1286251>>
- Ambarsari, Khory Wandira, and Helda Risman, 'The Indonesian National Armed Forces (Tni) And Falintil- Forças De Defesa De Timor Leste (F-Fdtl)'S Defense Diplomacy: A Way Of Conflict Resolution In Timor Leste', *Jurnal Pertahanan*, 2019 <<https://doi.org/10.33172/jp.v5i3.617>>
- Aris Kurniawan, 'Pengertian Strategi – Tingkat, Jenis, Bisnis, Integrasi, Umum, Para Ahli', *Gurupendidikan.Co.Id*, 2020
- Benarrivo, Renaldo, and Nala Nourma Nastiti, 'Diplomacy And Defense Spatial Planning', *Jurnal Dinamika Global*, 2020 <<https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.236>>
- Bhakti, Ikrar Nusa, and Diandra Megaputri Mengko, 'Intelijen Dalam Pusaran Demokrasi Di Indonesia Pasca Orde Baru', *Jurnal Penelitian Politik*, 2016
- 'Democratic Republic of Timor-Leste: 2019 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the Democratic Republic of Timor-Leste', *IMF Staff Country Reports*, 2019 <<https://doi.org/10.5089/9781498313599.002>>
- Dian Nursita, Surwandono, Ratih Herningtyas, 'Menakar Paradigma Keamanan Nasional Melalui Analisis Isi Terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara', *Jurnal Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33822/jm.v1i1.289>>
- Hanifah, Hana, *Kerjasama Intelijen Indonesia Dengan Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Indonesia Periode 2015-2017*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019
- Kahfian, Afi, and Sugiyo, *Intelijen Dan Eksistensi Direktorat Intelijen Keimigrasian Pada Direktorat Jenderal Imigrasi*, 2020

- Kammen, Douglas, *Independent Timor-Leste: Between Coercion and Consent*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781108558488>>
- Kuncoro, Wahyu, 'Aparat Pengawas Intern Pemerintah: Perannya Dalam Pengawasan Intelijen Yang Akuntabel Di Badan Intelijen Negara', *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5629>>
- Maia, Helio José Santos, and Maria Helena da Silva Carneiro, 'O Desafio Do Timor-Leste Atual: Em Busca de Uma Identidade Nacional Ligada à Língua Portuguesa', *Remate de Males*, 2018 <<https://doi.org/10.20396/remate.v38i1.8651113>>
- Malik, Abdul, Tamjidillah Tamjidillah, and Satriawan Satriawan, 'Budaya Literasi Dan Infiltrasi Gerakan Islam Radikal Di Pesantren Indonesia', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2020 <<https://doi.org/10.15642/islamica.2020.15.1.48-67>>
- Mathis, Robert L., and John H. Jackson, 'Manajemen Sumber Daya Manusia', in *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2012
- Melrose, J., R. Perroy, and S. Careas, 'Código de Ética Profissional Do Servidor Público Civil Do Poder Executivo Federal', *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 2015
- Muhammad Syahdiyar, 'Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasarakatan', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167>>
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2013
- Muradi, Muradi, 'Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia', *CosmoGov*, 2017 <<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11859>>
- Nugroho, Trisapto Agung, 'Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.275-293>>
- Nuraini, Fitri, Sinta Nuri Handayani, and Indra Permana, 'Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Semangat', *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Indonesias*, 2018
- Picchiai, Djair, and Alan Rocha, 'A Inteligência Analítica Em Pequenas Unidades Do Setor de Segurança Pública No Sul de Minas Gerais', *Ciência Da Informação Em Revista*, 2019 <<https://doi.org/10.28998/cirev.2019v6n2g>>
- Prakasa, Johan Ericka Wahyu, 'Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Melalui Klasifikasi Serangan Terhadap Sistem Informasi', *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 2020 <<https://doi.org/10.32815/jitika.v14i2.452>>
- Sahudiyono, Sahudiyono, and Fraquelino Pinto, 'Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota'ain Perbatasan Negara Indonesia – Timor Leste', *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 2019 <<https://doi.org/10.33489/mibj.v17i2.206>>
- Septin, Tri, 'Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam', *Keunggulan Bersaing Perusahaan Meningkatkan*, 2019
- Sidharta, B. Arief, 'Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum', *Veritas et Justitia*, 2015

- <<https://doi.org/10.25123/vej.1423>>
- Silva, Ivon Jorge da, 'Inteligência Policial e Redes Sociais: A Polícia Federal Em Busca de Uma Política Constitucionalmente Sustentável', *Revista Brasileira de Ciências Policiais*, 2014
- Silva, Ruy Martins Altenfelder, 'Prêmio Moinho Santista: Tradição a Serviço Da Inteligência Nacional', *Estudos Avançados*, 1994
<<https://doi.org/10.1590/s0103-40141994000300096>>
- Sinta, Ike Malaya, 'Manajemen Sarana Dan Prasarana', *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 2019 <<https://doi.org/10.15575/isema.v4i1.5645>>
- Sugito, Tulus Warsito, and Achmad Nurmandi, 'A Toxicidade Institucional Em Reformas Do Setor De Segurança: Lições Aprendidas Sobre O Fracasso Na Construção Das Instituições De Segurança Do Timor-Leste', *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, 2020
- Sunyowati, Dina, Haidar Adam, and Ria Tri Vinata, 'The Principles of Uti Possidetis Juris As an Alternative to Settlement Determination of Territorial Limits in the Oecusse Sacred Area (Study of the NKRI and RDTL Boundaries)', *Yuridika*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v34i2.12640>>
- Supit, Trina, *Rebuilding the Education Sector in East Timor during UNTAET: International Collaboration and Timorese Agency*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9780429326554>>
- Ulum, Amalia Zidatul, and Suharno Suharno, 'Infiltrasi Budaya Global Terhadap Budaya Lokal Pesta Baratan Dalam Mempengaruhi Pembentukan Budaya Kewargaan', *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 2019
<<https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.10023>>
- Vijayan, Jaynitha, and Geetha A. Rubasundram, 'Human Trafficking: An Asian Perspective', *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 2020
<<https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i2/pr200422>>
- Yani, Ahmad, 'Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>>
- Yasma'un, Irhas Novianti, Audi Fatchur Rachman, and Nur Retno Ika Martiyah, 'Perjanjian Perbatasan Laut Antara Australia Dengan Timor Leste Terhadap Status Wilayah Laut Timor', *Perspektif*, 2018
<<https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.679>>
- Zaki, M., 'Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen', *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 2018
<<https://doi.org/10.15642/manova.v1i2.350>>
- Zubaidi, Nabila, Dwi Cahyono, and Astrid Maharani, 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan', *International Journal of Social Science and Business*, 2019 <<https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i2.17579>>